

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLORA**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Formulasi / Rumus Penghitungan	Sumber Data
Meningkatkan kapasitas, kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dan Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat	Indeks Profesionalitas Aparatur	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Persentase Pejabat sesuai kompetensi	%	Mencerminkan tingkat kesesuaian dalam pengisian jabatan.	$IP = \frac{\text{Jumlah PNS memenuhi syarat menduduki jabatan administrasi dan fungsional}}{\text{Jumlah Pejabat Administrasi dan Fungsional}} \times 100\%$	Internal BKD (Bagian jabatan)
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	%	Indikator ini mencerminkan tingkat ideal jumlah aparatur	$\frac{\text{Jumlah PNS yang ada}}{\text{Jumlah PNS yang seharusnya ada}} \times 100\%$	Internal BKD (Laporan kebutuhan formasi CPNS)
		Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%	Mencerminkan tingkat kepastian hukum terhadap kasus-kasus kepegawaian dan proses perkawinan / perceraian PNS	$\frac{\text{Jumlah kasus izin perkawinan dan perceraian telah selesai}}{\text{Jumlah kasus, izin perkawinan dan perceraian ditangani BKD}} \times 100\%$	Internal BKD (bagian penegakan disiplin)

	Indeks kepuasan masyarakat / penerima layanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase kepuasan masyarakat / penerima layanan administrasi kepegawaian (non kumulatif)	%	Merupakan bagian dari Survey Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk umpan balik pelayanan BKD	$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah responden}} \times 100 \%$	Data primer dari responden (<i>beneficiaries</i>)
		Meningkatnya akurasi data kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian	%	Mencerminkan updating data PNS dalam aplikasi SIMPEG	$\frac{\text{Jumlah data PNS akurat}}{\text{Jumlah data PNS seharusnya terisi}} \times 100\%$	Internal BKD (admin SIMPEG)
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Huruf	Mencerminkan tingkat ketertiban administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja OPD	Sesuai ketentuan penilaian SAKIP OPD	Tim Penilai SAKIP OPD